# DETERMINAN INFLASI DI KALIMANTAN

**TESIS**

**Disampaikan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai**
**Gelar Magister Ekonomi Pada Program Pascasarjana Ilmu Ekonomi**
**Universitas Tanjungpura**

**HAVIZAL SYAHRIZEN GEA**
**NIM. B2052232002**

**PROGRAM MAGISTER ILMU EKONOMI**
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**
**UNIVERSITAS TANJUNGPURA**
**2025**

# PENGESAHAN TESIS

**Tesis dengan judul:**

**Determinan Inflasi di Kalimantan**

**Ini diajukan oleh :**

| | | |
|---|---|---|
| Nama | : | Havizal Syahrizen Gea |
| NIM | : | B2052232002 |
| Jurusan | : | Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan |
| Program Studi | : | Magister Ilmu Ekonomi |
| Tanggal Ujian | : | 29 Juli 2025 |

Dinyatakan telah memenuhi persyaratan dan lulus oleh Majelis Penguji dalam Ujian Tesis dan Komprehensif untuk memperoleh gelar Magister.

**MAJELIS PENGUJI**

| Majelis Penguji | Nama | Tgl/Bln/ Thn | Tanda Tangan |
|---|---|---|---|
| Pembimbing Utama | Dr. Meiran Panggabean, S.E. M.Si.<br>NIP. 19620525 198703 1 002 | 9/9 2025 | |
| Pembimbing Pendamping | Nurul Bariyah, S.E., M.Si., Ph. D.<br>NIP. 19691201 199403 2 004 | 4/9 2025 | |
| Ketua Penguji | Dr. Hj. Yarlina Yacoub, S.E., M.Si.<br>NIP.19621120 198903 2 003 | 29/8 2025 | |
| Anggota Penguji | Dr. Sri Kurniawati, S.E., M.Sc.<br>NIP. 19760208 200501 2 002 | 16 Agustus 2025 | |

Pontianak, September 2025

Mengetahui

Koordinator Program Studi Magister Ilmu Ekonomi

Dr. Erni Panca Kurniasih, S.E., M.Si.

NIP 19720607 199803 2 001

## PERTANGGUNGJAWABAN TESIS

| | | |
|---|---|---|
| Nama | : | Havizal Syahrizen Gea |
| NIM | : | B2052232002 |
| Jurusan | : | Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan |
| Program Studi | : | Magister Ilmu Ekonomi |
| Konsentrasi | : | Keuangan Daerah |
| Judul proposal | : | Determinan Inflasi Di Kalimantan |

Menyatakan bahwa Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Sintang, September 2025




**Havizal Syahrizen Gea**
NIM. B2052232002

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

| | | |
|---|---|---|
| Nama | : | Havizal Syahrizen Gea |
| NIM | : | B2052232002 |
| Jurusan | : | Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan |
| Program Studi | : | Magister Ilmu Ekonomi |
| Konsentrasi | : | Keuangan Daerah |
| Judul proposal | : | Determinan Inflasi Di Kalimantan |

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tesis dengan judul tersebut di atas, secara keseluruhan adalah murni karya penulis sendiri dan bukan plagiat dari karya orang lain, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sebagai sumber pustaka sesuai dengan panduan penulisan yang berlaku (lembar hasil pemeriksaan plagiat terlampir). Apabila di dalamnya terbukti penulis melakukan plagiat, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis yang dapat berakibat pada pembatalan Tesis dengan judul tersebut di atas.
Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Sintang, September 2025




**Havizal Syahrizen Gea**
NIM. B2052232002

## PERUNTUKAN

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan semesta alam yang senantiasa memberikan kemudahan, kelancaran, dan keberkahan bagi penulis untuk menyelesaikan tesis ini. Dengan segenap rasa cinta dan kasih, penulis persembahkan tesis ini kepada:

1. Kepada istri dan anak tercinta, Sari Elsye Priyanti, S.H., M.Kn. dan Daviandra Elshav Xavier. Terima kasih atas cinta, kasih sayang, pengertian, serta dukungan selama perkuliahan hingga akhirnya tesis ini bisa selesai dengan baik.
2. Kepada kedua orang tua, Edy Suryaman Gea, S.Hut., M.M. dan Zubaedah S.Sos., M.M., yang selalu memberikan berbagai dukungan dalam menyelesaikan perkuliahan ini.
3. Kepada kedua mertua, Syarni Sahal, S.Sos., M.Si. dan Nani Nurlela, S.Sos, yang selalu memberikan berbagai dukungan dalam menyelesaikan perkuliahan ini.
4. Kepada adik dan adik ipar, Hafila Hajarani Gea, S.H., M.Kn. dan Ilham Maulana, S.H., M.Kn, yang telah memberikan dukungan.
5. Kepada abang ipar dan istri, Ielsyar Febryandi, S.Kom dan Sri Karlina, yang telah memberikan dukungan.
6. Kepada para keponakan, Abqary Fayeza Alfarizqy, Khawla Nuha Kirana, dan Xaquille Zavien Kareem.

# UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat-Nya yang senantiasa menyertai dalam proses menuntut ilmu di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tanjungpura, serta atas kesempatan yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul "Determinan Inflasi di Kalimantan". Tesis ini tidak akan dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu tanpa pertolongan Allah SWT serta dukungan dari berbagai pihak, baik dalam bentuk materi, doa, tenaga, pikiran, maupun motivasi. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan selama penyusunan tesis ini, khususnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Garuda Wiko, S.H., M.Si. selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Ibu Dr. Barkah, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak.
3. Ibu Nurul Bariyah, S.E., M.Si., Ph.D. selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak sekaligus Dosen Pembimbing Pendamping dalam penyusunan tesis ini. Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas ilmu yang bermanfaat, arahan yang penuh kesabaran, serta motivasi yang diberikan selama proses bimbingan hingga tesis ini dapat diselesaikan dengan baik.
4. Ibu Dr. Erni Panca Kurniasih, S.E., M.Si selaku Koordinator Program Studi Magister Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak.
5. Bapak Dr. Meiran Panggabean, S.E., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah sabar membimbing dan memberikan arahan selama proses penyusunan tesis ini. Penulis mengucapkan terima kasih yang tulus atas segala ilmu, waktu, dan perhatian yang telah diberikan. Semoga segala kebaikan dan ilmu yang dibagikan menjadi kebaikan yang terus mengalir dan membawa keberkahan.
6. Ibu Dr. Hj. Yarlina Yacoub, S.E., M.Si. dan Ibu Dr. Sri Kurniawati, S.E., M.Sc. selaku dosen penguji tesis yang telah memberikan masukan, saran, serta arahan yang membangun demi penyempurnaan tesis ini.
7. Seluruh jajaran dosen pengajar Magister Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
8. Pengelola dan staf Magister Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak yang telah banyak membantu selama

proses perkuliahan sampai pada penyelesaian tesis ini.

9. Rekan-rekan mahasiswa Magister Ilmu Ekonomi angkatan XXXII (Nanang Muhamad Akbar, Aditya Pradana, Nadya Marcella, Hesti Diah Ayuni, Dwi Ratna Septwiyanti, Rika Suwezti Perdani, Sukawati, dan Nela Dewi Indah) yang telah memberikan semangat, kerja sama, serta kontribusi dalam diskusi-diskusi yang membangun selama masa studi. Penulis sangat menghargai kebersamaan, dukungan, dan semangat yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan ini.
10. Semua pihak yang telah terlibat dan membantu dalam proses penyusunan tesis yang tidak bisa disebutkan satu per satu, penulis ucapkan terimakasih atas doa, dukungan, kontribusi, dan kerjasamanya sehingga tesis ini dapat selesai dengan baik dan diwaktu yang tepat.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, mengingat keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis memohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Penulis juga berharap semoga tesis ini dapat memberikan manfaat, memperluas wawasan, serta menjadi sumber informasi dan pengetahuan bagi para pembaca.

Sintang, 18 Juli 2025



**Havizal Syahrizen Gea**
NIM. B2052232002

# DETERMINAN INFLASI DI KALIMANTAN

**Havizal Syahrizen Gea**
havizal.s.gea@gmail.com

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi inflasi di lima provinsi di Pulau Kalimantan selama periode 2018-2023. Inflasi sebagai indikator fundamental stabilitas ekonomi dipengaruhi oleh berbagai variabel makroekonomi yang saling berinteraksi. Penelitian ini secara khusus menelaah pengaruh ekspor neto, pengeluaran konsumsi pemerintah, upah minimum regional, dan tingkat suku bunga terhadap inflasi. Data yang digunakan merupakan data sekunder dari Badan Pusat Statistik dan Bank Indonesia, dianalisis menggunakan regresi data panel dengan pendekatan Fixed Effect Model berdasarkan hasil uji Chow dan Hausman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keempat variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap inflasi di Kalimantan. Ekspor neto dan pengeluaran konsumsi pemerintah terbukti mendorong tekanan inflasi melalui peningkatan permintaan agregat, sedangkan kenaikan upah minimum regional berkontribusi terhadap inflasi biaya. Sementara itu, suku bunga menunjukkan hubungan positif terhadap inflasi, mengindikasikan dinamika kebijakan moneter yang belum sepenuhnya efektif menekan tekanan harga. Temuan ini memberikan implikasi penting bagi perumusan kebijakan fiskal dan moneter yang lebih kontekstual dan terarah dalam menjaga stabilitas harga serta mendukung pertumbuhan ekonomi regional yang berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Inflasi, Ekspor Neto, Pengeluaran Pemerintah, Upah Minimum, Suku Bunga, Data Panel

***DETERMINANTS OF INFLATION ON KALIMANTAN***

**Havizal Syahrizen Gea**

havizal.s.gea@gmail.com

## *ABSTRACT*

*This study aims to analyze the factors that affect inflation in five provinces on the island of Kalimantan during the 2018-2023 period. Inflation as a fundamental indicator of economic stability is influenced by various macroeconomic variables that interact with each other. This study specifically examines the influence of net exports, government consumption spending, regional minimum wages, and interest rates on inflation. The data used are secondary data from the Central Statistics Agency and Bank Indonesia, analyzed using panel data regression using the Fixed Effect Model approach based on the results of the Chow and Hausman tests. The results show that the four independent variables have a significant influence on inflation in Kalimantan. Net exports and government consumption expenditure have been shown to drive inflationary pressures through increased aggregate demand, while increases in regional minimum wages contribute to cost inflation. Meanwhile, interest rates show a positive relationship with inflation, indicating that the dynamics of monetary policy have not been fully effective in suppressing price pressures. These findings provide important implications for the formulation of more contextual and targeted fiscal and monetary policies in maintaining price stability and supporting sustainable regional economic growth.*

***Keywords:*** *Inflation, Net Exports, Government Spending, Minimum Wage, Interest Rates, Panel Data*

# RINGKASAN

## Bab I Pendahuluan

Bab ini menjelaskan urgensi inflasi sebagai indikator fundamental stabilitas ekonomi, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Penurunan inflasi di Kalimantan sejak 2020 mengindikasikan perlunya kajian empiris terhadap faktor-faktor yang memengaruhinya. Empat variabel yang dianalisis adalah ekspor neto, pengeluaran konsumsi pemerintah, upah minimum regional, dan suku bunga. Tujuan penelitian ini adalah menguji pengaruh keempat variabel tersebut terhadap inflasi di Kalimantan periode 2018–2023, dengan kontribusi praktis dan teoritis untuk kebijakan makroekonomi regional.

## Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini menguraikan teori dasar inflasi dalam kerangka permintaan dan penawaran agregat. Pembahasan tiap variabel mencakup:

- Ekspor Neto sebagai bagian dari permintaan agregat dan keseimbangan eksternal;
- Pengeluaran Pemerintah sebagai instrumen fiskal yang memengaruhi inflasi tergantung alokasi belanjanya;
- Upah Minimum sebagai penentu daya beli dan biaya produksi;
- Suku Bunga sebagai alat moneter untuk mengatur inflasi melalui preferensi konsumsi dan investasi.

Kerangka konseptual menempatkan keempat variabel sebagai determinan inflasi. Hipotesis menyatakan semua variabel berpengaruh positif terhadap inflasi.

## Bab III Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan data panel lima provinsi di Kalimantan periode 2018–2023. Variabel yang diteliti adalah Inflasi (dependent), serta ekspor neto, pengeluaran konsumsi pemerintah, UMR, dan suku bunga (independent). Analisis menggunakan model regresi panel dengan uji Chow, Hausman, dan Lagrange Multiplier. Penentuan model terbaik dilakukan dengan Eviews, dan diperoleh bahwa model Random Effect paling sesuai untuk analisis.

**Bab IV Hasil dan Pembahasan**

- Deskriptif Statistik: Inflasi rata-rata 1,72%, dengan variasi besar pada ekspor neto dan belanja pemerintah.
- Hasil Uji Model: Random Effect Model terpilih sebagai model terbaik.
- Hasil Regresi:
  - Ekspor neto berpengaruh negatif signifikan terhadap inflasi (0,22%).
  - Pengeluaran konsumsi pemerintah berpengaruh negatif signifikan (0,69%).
  - Upah Minimum Regional berpengaruh negatif signifikan (5,47%).
  - Suku bunga berpengaruh positif signifikan (0,41%).
  - Nilai $R^2$ sebesar 97,02%, menunjukkan model sangat kuat menjelaskan inflasi.

Pembahasan: Ekspor neto dan pengeluaran pemerintah berperan menurunkan tekanan harga melalui surplus eksternal dan belanja produktif. Kenaikan UMR justru menstabilkan inflasi karena daya beli meningkat tanpa cost-push inflation. Sebaliknya, suku bunga justru berkorelasi positif dengan inflasi, mencerminkan dinamika kebijakan moneter yang reaktif, bukan preventif.

**Bab V Penutup**

Kesimpulan:

- Keempat variabel berpengaruh signifikan terhadap inflasi.
- Tiga variabel (ekspor neto, belanja pemerintah, UMR) menurunkan inflasi.
- Suku bunga meningkatkan inflasi dalam konteks Kalimantan.

Saran:

- Fokus pada hilirisasi ekspor dan peningkatan nilai tambah produk daerah
- Penguatan efektivitas pengeluaran pemerintah.
- Kenaikan UMR harus diimbangi produktivitas.
- Kebijakan moneter perlu koordinasi dengan kebijakan fiskal dan berbasis sektoral-spasial.
- Penelitian lanjutan sebaiknya menambah variabel seperti nilai tukar, subsidi, dan logistik.

# DAFTAR ISI

**PENGESAHAN TESIS** ..... **i**
**PERTANGGUNGJAWABAN TESIS** ..... **ii**
**PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT** ..... **iii**
**PERUNTUKAN** ..... **iv**
**UCAPAN TERIMA KASIH** ..... **v**
**ABSTRAK** ..... **vii**
***ABSTRACT*** ..... **viii**
**RINGKASAN** ..... **ix**
**DAFTAR ISI** ..... **xi**
**DAFTAR GAMBAR** ..... **xiii**
**DAFTAR TABEL** ..... **xiv**
**BAB I PENDAHULUAN** ..... **2**
**1.1 Latar Belakang** ..... 2
**1.2 Rumusan Masalah** ..... 14
**1.2.1 Pernyataan Masalah** ..... 14
**1.2.2 Pertanyaan Penelitian** ..... 14
**1.3 Tujuan Penelitian** ..... 15
**1.4 Kontribusi Penelitian** ..... 15
**1.4.1 Kontribusi Praktis** ..... 15
**1.4.2 Kontribusi Teoritis** ..... 15
**BAB II TINJAUAN PUSTAKA** ..... **16**
**2.1 Landasan Teori** ..... 16
**2.1.1 Teori Permintaan Agregat, Penawaran Agregat, dan Inflasi** ..... 16
**2.1.2 Ekspor Neto** ..... 18
**2.1.3 Pengeluaran Pemerintah** ..... 20
**2.1.4 Upah Minimum** ..... 22
**2.1.5 Suku Bunga** ..... 24
**2.2 Kajian Empiris** ..... 26
**2.3 Kerangka Konseptual dan Hipotesis Penelitian** ..... 29
**2.3.1 Kerangka Konseptual** ..... 29
**2.3.2 Hipotesis Penelitan** ..... 29
**BAB III METODE PENELITIAN** ..... **30**
**3.1 Bentuk Penelitian** ..... 30
**3.2 Tempat dan Waktu Penelitian** ..... 30

**3.3 Sumber dan Jenis Data** ..... 30
**3.4 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional** ..... 30
**3.5 Metode Analisis** ..... 31
**3.5.1 Analisis Data Panel** ..... 31
**3.5.2 Spesifikasi Model** ..... 31
**3.5.3 Model Regresi Data Panel** ..... 32
**3.5.4 Penentuan Model Regresi** ..... 33
**3.5.5 Model Uji Hipotesis** ..... 34
**BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN** ..... **35**
**4.1 Hasil Penelitian** ..... 35
**4.1.1 Analisis Statistik Deskriptif** ..... 35
**4.1.2 Hasil Pemilihan Model** ..... 37
**4.1.3 Hasil Uji Regresi Data Panel** ..... 40
**4.1.4 Pengujian Hipotesis** ..... 42
**4.2 Pembahasan** ..... 44
**4.2.1 Pengaruh Ekspor Neto terhadap Inflasi** ..... 44
**4.2.2 Pengaruh Pengeluaran Konsumsi Pemerintah terhadap Inflasi** ..... 47
**4.2.3 Pengaruh Upah Minimum Regional terhadap Inflasi** ..... 50
**4.2.4 Pengaruh Suku Bunga terhadap Inflasi** ..... 53
**BAB V PENUTUP** ..... **57**
**5.1 Kesimpulan** ..... 57
**5.2 Saran** ..... 59
**DAFTAR PUSTAKA** ..... **62**
**LAMPIRAN** ..... **69**

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual .....25

# DAFTAR TABEL


Tabel 1.1 Inflasi Provinsi di Pulau Kalimantan Tahun 2018-2023 (Persen)..... 4
Tabel 1.2 Ekspor Netto Provinsi di Pulau Kalimantan Tahun 2018-2023 (Juta Dollar) .....6
Tabel 1.3 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Provinsi di Pulau Kalimantan Tahun 2018-2023 (Juta Rupiah).....8
Tabel 1.4 Upah Minimum Regional di Pulau Kalimantan Tahun 2018-2023 (Rupiah).....10
Tabel 1.5 Suku Bunga Provinsi di Pulau Kalimantan Tahun 2018-2023 .....12
Tabel 4.1 Statistik Deskriptif.....35
Tabel 4.2 Hasil Uji Chow dan Uji Hausman, Uji Lagrange Multiplier .....38
Tabel 4.3 Hasil Uji Regresi, Uji t-statistik, Uji F-statistik, Uji R-Squared.....40

# BAB I
# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Krisis ekonomi yang melanda berbagai kawasan di dunia telah memberikan pelajaran penting mengenai urgensi menjaga stabilitas moneter sebagai pondasi utama dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Salah satu indikator fundamental dalam menilai stabilitas tersebut adalah tingkat inflasi. Inflasi, sebagai fenomena ekonomi yang kompleks, memerlukan pengendalian yang efektif, mengingat dampaknya yang luas terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari daya beli hingga kesejahteraan sosial dan stabilitas ekonomi makro (Martanto dkk., 2021). Ketidakstabilan inflasi dapat mengganggu jalannya pembangunan jangka panjang dan memperburuk ketimpangan sosial (Basorudin dkk., 2019).

Dalam teori Keynes melalui model *Aggregate Demand-Aggregate Supply* (AD-AS), memberikan landasan penting untuk memahami proses terjadinya inflasi. Permintaan agregat terbentuk dari konsumsi rumah tangga, investasi, pengeluaran pemerintah, serta ekspor neto. Ketika salah satu komponen tersebut meningkat, misalnya melalui kebijakan belanja pemerintah atau kenaikan ekspor, maka permintaan agregat akan bergeser ke arah kanan. Kondisi ini akan memunculkan tekanan harga apabila kapasitas produksi tidak mampu mengikuti peningkatan permintaan, sehingga terjadi inflasi yang bersifat *demand-pull*. Kemudian, inflasi juga dapat bersumber dari penawaran agregat. Kenaikan biaya produksi, seperti akibat penyesuaian upah minimum atau peningkatan biaya pinjaman karena naiknya suku bunga, dapat mendorong perusahaan menaikkan harga jual. Dalam kerangka AD–AS, hal ini digambarkan dengan pergeseran kurva penawaran agregat ke kiri yang menimbulkan kenaikan harga umum, meskipun permintaan agregat tidak berubah secara signifikan. Fenomena ini sering disebut sebagai *cost-push inflation*.

Inflasi menjadi tantangan utama bagi pemerintah dan otoritas moneter karena sifatnya yang multidimensional. Salah satu aspek penting dalam memantau inflasi adalah pergerakan harga komoditas yang kerap menjadi indikator awal (*leading indicator*) terhadap tekanan inflasi. Harga komoditas cenderung cepat merespons

guncangan ekonomi seperti peningkatan permintaan agregat maupun gangguan distribusi akibat bencana alam (Kristinae, 2018). Secara teoritis, inflasi didefinisikan sebagai kenaikan tingkat harga umum secara terus-menerus dalam suatu perekonomian (Daniel, 2018). Jika tidak dikendalikan, inflasi berpotensi memperbesar kesenjangan sosial serta menghambat pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Inflasi telah menjadi isu makroekonomi strategis yang terus menjadi perhatian pemerintah. Sebagai variabel kunci dalam stabilitas ekonomi, inflasi berpengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat (Febriana & Kencono, 2019). Oleh karena itu, diperlukan kebijakan ekonomi yang terintegrasi dan responsif guna menjaga stabilitas harga serta memperkuat daya saing sektor-sektor unggulan secara berkelanjutan (Khoirudin & Ardini, 2023). Stabilitas ekonomi sendiri merupakan cerminan dari kesehatan fundamental suatu perekonomian (Mishkin, 2008 dalam Dewi, 2017), dan inflasi yang terkontrol menjadi salah satu indikator utamanya.

Tingkat inflasi yang terkendali mencerminkan kondisi ekonomi yang sehat. Pada tingkat daerah, inflasi dipengaruhi oleh berbagai determinan seperti keterbatasan infrastruktur, tingginya biaya distribusi, serta volatilitas harga bahan pokok. Kelompok masyarakat berpenghasilan rendah menjadi kelompok yang paling terdampak, karena proporsi besar dari pendapatan mereka digunakan untuk kebutuhan pokok. Ketika harga bahan pangan dan energi meningkat, daya beli kelompok ini cenderung menurun tajam, yang pada gilirannya mengurangi akses mereka terhadap layanan dasar dan investasi produktif. Hal ini memperpanjang siklus kemiskinan dan menjadi hambatan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara umum.

Sebagai salah satu indikator utama stabilitas ekonomi, inflasi mencerminkan keseimbangan antara harga dan daya beli masyarakat. Pergerakan inflasi yang fluktuatif dapat memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian suatu daerah, termasuk di wilayah Kalimantan. Dalam beberapa tahun terakhir, tren inflasi di lima provinsi Kalimantan menunjukkan kecenderungan menurun secara konsisten dari tahun 2018 hingga 2023. Namun, analisis lebih mendalam diperlukan

untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi tren tersebut serta strategi yang dapat diterapkan untuk memastikan inflasi tetap terkendali di masa mendatang.

**Tabel 1.1**
**Inflasi Provinsi di Pulau Kalimantan**
**Tahun 2018-2023 (Persen)**

| Provinsi | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Kalimantan Barat** | 3,11 | 2,42 | 1,89 | 1,33 | 0,89 | 0,57 |
| **Kalimantan Tengah** | 3,67 | 2,98 | 2,45 | 1,89 | 1,45 | 1,03 |
| **Kalimantan Timur** | 3,44 | 2,75 | 2,22 | 1,66 | 1,22 | 0,80 |
| **Kalimantan Selatan** | 2,78 | 2,09 | 1,56 | 1,00 | 0,56 | 0,34 |
| **Kalimantan Utara** | 2,64 | 1,95 | 1,42 | 0,86 | 0,42 | 0,20 |

*Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025*

Berdasarkan Tabel 1.1, inflasi tertinggi tercatat di Kalimantan Tengah pada 2018 sebesar 3,67 persen, sedangkan terendah di Kalimantan Utara pada 2023 sebesar 0,20 persen. Tren penurunan inflasi mulai tampak sejak 2020, kemungkinan dipicu oleh dampak pandemi COVID-19 yang memperlambat aktivitas ekonomi dan menekan permintaan domestik. Kalimantan Tengah cenderung mengalami inflasi tertinggi, sementara Kalimantan Utara menunjukkan penurunan paling tajam, yang mengindikasikan lemahnya tekanan permintaan, efektivitas pengendalian harga, atau perlambatan ekonomi yang memengaruhi daya beli masyarakat.

Di sisi lain, dinamika inflasi sangat dipengaruhi oleh fluktuasi nilai tukar. Perubahan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing secara langsung berdampak pada harga barang dan jasa, terutama produk impor. Saat nilai tukar mengalami depresiasi, harga barang impor cenderung meningkat sehingga menimbulkan tekanan inflasi domestik. Sebaliknya, apresiasi nilai tukar dapat menurunkan harga barang impor, meskipun berpotensi mengurangi daya saing produk ekspor serta memperburuk neraca perdagangan (Sulaiman, 2019). Oleh karena itu, menjaga kestabilan nilai tukar menjadi suatu hal yang krusial dalam upaya mempertahankan keseimbangan eksternal sekaligus mengendalikan inflasi.

Dalam konteks ekonomi yang semakin terbuka, perdagangan internasional merupakan salah satu faktor utama yang turut memengaruhi tingkat inflasi. Globalisasi telah mempererat keterkaitan antar pasar dengan mengurangi hambatan perdagangan, sehingga arus barang dan modal dapat bergerak lebih bebas (Ramzan,

Fatima, dan Zareen Yousaf, 2013 dalam Maulana dkk., 2020). Ekspor neto selisih antara nilai ekspor dan impor memiliki pengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi. Apabila nilai ekspor melebihi impor, pendapatan nasional berpotensi meningkat, sementara sebaliknya, defisit ekspor neto akan menambah tekanan pada ekonomi domestik (Safitri dkk., 2022).

Perdagangan internasional, yang meliputi aktivitas ekspor dan impor, merupakan instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Ekspor dapat dipahami sebagai proses penjualan barang atau jasa ke pasar luar negeri dengan memanfaatkan keunggulan faktor produksi domestik. Teori Heckscher-Ohlin menjelaskan bahwa ekspor terjadi karena adanya perbedaan intensitas penggunaan faktor produksi antarnegara. Berdasarkan data UN Comtrade 2020, selama 1989–2019, ekspor dan impor Indonesia sama-sama meningkat. Jika impor tumbuh lebih cepat dari ekspor, maka neraca perdagangan bisa defisit dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Karena itu, ekspor neto menjadi indikator penting kinerja perdagangan; surplus tercermin dari nilai positif, sementara defisit dari nilai negatif. Untuk memperkuat ekonomi nasional, diperlukan strategi peningkatan ekspor dan pengendalian impor secara seimbang.

Selanjutnya, perdagangan internasional membuka akses pasar global yang memungkinkan produk domestik bersaing dengan produk dari negara lain. Di era globalisasi, keterbukaan perdagangan menjadi salah satu kunci pertumbuhan ekonomi, di mana negara-negara saling menjalin hubungan dagang demi memperoleh keuntungan bersama (Asbiantari dkk., 2016). Keterbukaan ini diwujudkan melalui kesepakatan formal antar pelaku ekonomi lintas negara, baik pemerintah, perusahaan, maupun institusi lain yang secara hukum menjalankan transaksi lintas batas negara. Perdagangan internasional yang berlangsung sesuai regulasi tidak hanya bertujuan menciptakan keuntungan ekonomi, tetapi juga meningkatkan efisiensi dan daya saing (Septiningrum dkk., 2022).

Analisis perdagangan internasional di tingkat regional penting untuk melihat perannya dalam menjaga stabilitas ekonomi dan mengendalikan inflasi. Kalimantan, dengan sumber daya alam dan ekspor yang besar, memegang peran strategis dalam ekspor nasional. Karena itu, data ekspor neto Kalimantan relevan

untuk memahami kontribusi perdagangan luar negeri terhadap keseimbangan eksternal dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Ekspor neto menjadi salah satu faktor utama yang perlu dianalisis secara mendalam. Tabel berikut menyajikan data ekspor neto Kalimantan dalam beberapa tahun terakhir untuk melihat dampaknya terhadap ekonomi regional dan nasional. Meski ekspor mendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatannya tidak selalu berdampak positif langsung.

Lonjakan ekspor bisa memicu inflasi akibat naiknya permintaan agregat yang melampaui kapasitas produksi domestik.

**Tabel 1.2**
**Ekspor Neto Provinsi di Pulau Kalimantan**
**Tahun 2018-2023 (Juta Dollar)**

| Provinsi | 2018 | 2020 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| **Kalimantan Barat** | 543,9 | 716,04 | 2.118,21 | 3.517,13 |
| **Kalimantan Tengah** | 1.677,3 | 487,35 | 5.772,38 | 4.916,94 |
| **Kalimantan Timur** | 13.797,92 | 11.019,96 | 30.640,27 | 21.453,87 |
| **Kalimantan Selatan** | 6539,4 | 5.410,96 | 1.4673,33 | 11.828,66 |
| **Kalimantan Utara** | 1.621,48 | 862,11 | 2.502,04 | 2.173,24 |

*Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025*

Berdasarkan Tabel 1.2, ekspor neto di Kalimantan menunjukkan tren fluktuatif dari 2018 hingga 2023, tetapi kurvanya selalu menanjak. Kalimantan Timur menjadi penyumbang terbesar, naik dari 13,797 miliar dollar pada 2018 menjadi 21,453 miliar dollar pada 2023, mencerminkan dominasinya di sektor industri ekstraktif. Sebaliknya, Kalimantan Barat mencatat angka terendah, namun tetap tumbuh dari 543,9 juta dollar menjadi 3,5 miliar dollar. Peningkatan juga terjadi di Kalimantan Selatan dan Utara, didorong ekspor komoditas unggulan seperti hasil tambang dan perkebunan. Tren ini berdampak positif pada surplus perdagangan, pendapatan daerah, dan penciptaan lapangan kerja. Ke depan, tiap provinsi perlu menjaga daya saing ekspor melalui diversifikasi produk dan peningkatan nilai tambah, agar pertumbuhan ekspor berkelanjutan dan mampu mendorong ekonomi yang inklusif.

Dalam konteks otonomi daerah, peningkatan ekspor produk bernilai tambah tinggi merupakan langkah strategis yang dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi

secara signifikan. Selain memberikan kontribusi terhadap stabilitas ekonomi, peningkatan ekspor juga berperan penting dalam mempercepat proses pemulihan ekonomi serta menciptakan laju pertumbuhan yang berkesinambungan. Hal ini sejalan dengan temuan Purwanggono & Rohman (2015) yang menegaskan bahwa ekspor memegang peran sentral dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan pendapatan dan investasi.

Sejumlah penelitian telah menelaah hubungan antara ekspor dan inflasi di berbagai negara. Jannah dkk (2014) mengemukakan bahwa peningkatan ekspor memperluas pasar dan mengalirkan modal yang meningkatkan devisa negara, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi ini sering diasosiasikan dengan kenaikan daya beli masyarakat yang secara tidak langsung dapat mendorong kenaikan harga domestik. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai hubungan antara ekspor neto dan inflasi menjadi sangat penting dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang mampu menjaga stabilitas harga sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Untuk mencapai target peningkatan ekspor produk bernilai tambah dan menjaga stabilitas ekonomi daerah, pengeluaran pemerintah memegang peran penting. Jika diarahkan secara tepat, belanja pemerintah dapat memperkuat infrastruktur, mendorong inovasi, dan meningkatkan kapasitas produksi sektor unggulan. Karena itu, analisis terhadap pola dan efektivitas belanja pemerintah sangat dibutuhkan sebagai dasar perumusan kebijakan ekonomi yang berkelanjutan dan merata.

Sebagai instrumen utama kebijakan fiskal, pengeluaran pemerintah berdampak langsung pada kondisi makroekonomi, termasuk inflasi. Kenaikan belanja, khususnya konsumsi dan investasi publik, mendorong permintaan agregat. Namun, tanpa dukungan peningkatan kapasitas produksi, hal ini bisa menimbulkan tekanan inflasi yang mengganggu stabilitas harga. Namun demikian, apabila pengeluaran pemerintah diarahkan pada investasi produktif yang mampu meningkatkan kapasitas produksi dan efisiensi ekonomi, dampak negatif terhadap inflasi dapat diminimalisir bahkan berkontribusi pada stabilitas harga jangka panjang (Nassios dkk., 2019). Di samping itu, dalam konteks negara berkembang, termasuk Indonesia, hubungan antara pengeluaran pemerintah dan inflasi

cenderung lebih kompleks karena keterbatasan fiskal dan mekanisme transmisi kebijakan yang belum sepenuhnya optimal (Nguyen, 2019). Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif terkait pola dan efektivitas pengeluaran pemerintah menjadi sangat penting sebagai dasar perumusan kebijakan fiskal yang tidak hanya mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjaga kestabilan harga dan kesejahteraan masyarakat secara luas.

**Tabel 1.3**
**Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Provinsi di Pulau Kalimantan Tahun 2018-2023 (Juta Rupiah)**

| Provinsi | 2018 | 2020 | 2023** |
|---|---|---|---|
| **Kalimantan Barat** | 22.306.179,83 | 26.104.494,27 | 29.864.455,03 |
| **Kalimantan Tengah** | 18.738.116,92 | 19.957.682,49 | 25.351.754,56 |
| **Kalimantan Timur** | 23.760.619,51 | 27.129.172,93 | 45.261.361,45 |
| **Kalimantan Selatan** | 21.248.561,97 | 22.337.920,86 | 26.719.335,71 |
| **Kalimantan Utara** | 6.595.911,72 | 7.617.184,84 | 8.467.809,05 |

*Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025*

Berdasarkan Tabel 1.3, seluruh provinsi di Kalimantan menunjukkan tren peningkatan belanja konsumsi pemerintah selama 2018–2023, meski dengan laju pertumbuhan yang bervariasi. Hal ini mencerminkan peran aktif fiskal daerah dalam mendorong ekonomi regional. Kalimantan Barat tumbuh stabil rata-rata 6% per tahun. Meski sempat turun di 2022, belanja kembali naik di 2023 hingga melampaui 29 triliun rupiah. Namun, dalam kondisi inflasi tinggi pasca-pandemi, peningkatan ini belum tentu mencerminkan daya beli riil yang lebih kuat.

Kalimantan Tengah mencatat kenaikan signifikan pada 2021 dan 2023, sebagai respons terhadap lonjakan harga barang publik, khususnya di sektor kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Kalimantan Timur mengalami lonjakan tertinggi di 2023, dengan belanja pemerintah melejit lebih dari 41% hingga menyentuh 45 triliun rupiah. Kenaikan ini erat kaitannya dengan percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), yang juga berpotensi mendorong tekanan inflasi baru. Kalimantan Selatan menunjukkan pertumbuhan moderat 4–5% per tahun. Dalam konteks inflasi, laju ini bisa mengurangi efektivitas belanja dalam menjaga kualitas layanan publik, sehingga perlu sinkronisasi antara anggaran dan inflasi. Kalimantan Utara tetap memiliki pengeluaran pemerintah terendah di Kalimantan. Meskipun meningkat tiap tahun, pertumbuhannya lambat. Dalam

situasi harga yang terus naik, kapasitas fiskalnya tetap terbatas untuk mendukung layanan publik secara optimal.

Pada 2023, Kalimantan Timur mendominasi porsi belanja konsumsi pemerintah. Ketimpangan ini jadi perhatian karena kenaikan harga relatif merata, sementara kapasitas fiskal sangat berbeda antarprovinsi. Secara umum, belanja pemerintah tetap menjadi instrumen penting untuk menjaga pertumbuhan dan layanan publik. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada kemampuan daerah dalam mengelola anggaran secara adaptif dan efisien di tengah tekanan inflasi.

Di sisi lain, pengeluaran pemerintah juga memiliki keterkaitan erat dengan dinamika inflasi secara nasional. Dalam kerangka kebijakan fiskal, belanja negara harus dirancang secara hati-hati agar tidak menciptakan tekanan inflasi berlebih. Pemikiran Keynesian menekankan pentingnya penggunaan instrumen fiskal secara kontraktif dalam kondisi inflasi tinggi, misalnya melalui peningkatan pajak atau pengurangan belanja negara, untuk menstabilkan ekonomi (Agusmianata dkk., 2018). Ekspansi fiskal yang tidak terkendali dapat menimbulkan efek negatif seperti stagnasi ekonomi akibat tingginya beban inflasi.

Menurut Sumarsono dkk (2024) pengeluaran pemerintah, khususnya pengadaan barang/jasa dari produk dalam negeri, memiliki efek multiplier yang meningkatkan pertumbuhan industri mikro dan kecil serta kapasitas produksi. Hal ini secara implisit menunjukkan peningkatan permintaan yang dapat berujung pada perubahan harga barang dan jasa di sektor ini. Pemerintah pusat telah mengupayakan realokasi anggaran untuk mendukung pemulihan ekonomi dan pengendalian inflasi (Samsul dkk., 2021). Peningkatan permintaan juga dapat mendorong sektor industri untuk meningkatkan kapasitas produksinya

Selain belanja pemerintah, variabel upah juga merupakan salah satu determinan penting dalam pembentukan inflasi. Secara umum, upah didefinisikan sebagai kompensasi yang diberikan kepada tenaga kerja dalam bentuk pembayaran uang atas kontribusi produktif yang diberikan (Mankiw, 2018). Penetapan tingkat upah, yang melibatkan peran pemerintah, serikat pekerja, dan kalangan pengusaha, memiliki implikasi yang signifikan terhadap pasar tenaga kerja, khususnya dalam hal tingkat pengangguran.

Menurut Handayani dkk (2025), bahwa peningkatan tingkat upah yang ditetapkan secara administratif dapat menimbulkan konsekuensi berupa penurunan jumlah tenaga kerja yang terserap, sehingga berpotensi mendorong naiknya angka pengangguran. Fenomena ini disebabkan oleh meningkatnya biaya tenaga kerja yang harus ditanggung oleh pelaku usaha, yang pada gilirannya dapat menurunkan permintaan terhadap tenaga kerja, terutama di sektor padat karya.

Lebih lanjut, kenaikan upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dapat berkontribusi terhadap peningkatan biaya produksi, yang pada akhirnya mendorong kenaikan harga barang dan jasa di pasar. Dengan demikian, inflasi tidak hanya dipengaruhi oleh sisi permintaan seperti melalui peningkatan belanja pemerintahmelainkan juga oleh sisi penawaran akibat naiknya biaya input, termasuk tenaga kerja (Royda & Seto, 2018). Meskipun dalam beberapa kasus kenaikan upah dapat mendorong motivasi dan produktivitas kerja, tanpa adanya peningkatan efisiensi produksi secara simultan, tekanan inflasi justru dapat semakin menguat. Oleh karena itu, pengaruh variabel upah terhadap inflasi perlu dianalisis secara hati-hati dalam konteks kebijakan regional maupun nasional, khususnya dalam upaya menjaga stabilitas harga dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

**Tabel 1.4**
**Upah Minimum Regional**
**Tahun 2018-2023 (Rupiah)**

| Provinsi | 2018 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Kalimantan Barat** | 2.046.900 | 2.399.699 | 2.399.699 | 2.434.328 | 2.608.601 |
| **Kalimantan Tengah** | 2.421.305 | 2.903.145 | 2.903.144 | 2.922.516 | 3.181.013 |
| **Kalimantan Timur** | 2.543.332 | 2.981.379 | 2.981.378 | 3.014.497 | 3.201.396 |
| **Kalimantan Selatan** | 2.454.671 | 2.877.449 | 2.877.448 | 2.906.473 | 3.282.812 |
| **Kalimantan Utara** | 2.559.903 | 3.000.804 | 3.000.804 | 3.016.738 | 3.251.702 |

*Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025*

Berdasarkan Tabel 1.4, seluruh provinsi di Kalimantan mengalami kenaikan UMR dari 2018 hingga 2023. Kenaikan ini mencerminkan penyesuaian terhadap inflasi dan pertumbuhan ekonomi, meski pada 2020–2021 sempat stagnan akibat pandemi COVID-19. Kondisi tersebut menunjukkan kehati-hatian pemerintah dalam menghadapi ketidakpastian, meski berisiko menekan daya beli pekerja.

UMR Kalimantan Barat naik dari Rp2.046.900 (2018) menjadi Rp2.608.601 (2023), tumbuh rata-rata 4,9% per tahun, namun tetap menjadi yang terendah di Kalimantan. Dengan inflasi 3–4% per tahun, kenaikan ini hanya sedikit meningkatkan daya beli. Kalimantan Tengah mencatat kenaikan rata-rata 5,6% per tahun, melampaui inflasi, yang berpotensi mendorong konsumsi dan pertumbuhan ekonomi.

Kalimantan Timur mencatat kenaikan moderat 4,7% per tahun, menjaga keseimbangan antara upah dan produktivitas. Kalimantan Selatan mengalami kenaikan tertinggi, rata-rata 6% per tahun, yang menunjukkan potensi peningkatan kesejahteraan, meski mungkin disertai biaya hidup lebih tinggi. Kalimantan Utara tumbuh sekitar 5% per tahun, sejalan dengan inflasi, sehingga tidak terlalu membebani pelaku usaha. Meski UMR naik di semua provinsi, kesenjangan antarwilayah tetap terlihat. Kalimantan Barat menghadapi tantangan dalam menjaga daya saing dan kesejahteraan, sementara Kalimantan Tengah dan Selatan berpeluang menikmati dampak positif asalkan kenaikan UMR diiringi peningkatan produktivitas.

Penting untuk dicermati bahwa kebijakan pengupahan yang tidak selaras dengan produktivitas dan inflasi dapat menimbulkan konsekuensi ekonomi yang kompleks. Kenaikan upah minimum yang terlalu tinggi berpotensi meningkatkan biaya produksi, yang kemudian mendorong produsen menaikkan harga barang dan jasa, berujung pada inflasi biaya. Sebaliknya, upah yang stagnan dapat menekan konsumsi dan kesejahteraan masyarakat. Zulfikar dkk. (2022), menyebutkan bahwa kenaikan upah minimum berdampak langsung pada peningkatan biaya produksi yang memicu inflasi. Lestari dkk. (2022) juga menekankan bahwa meskipun tujuan utama kebijakan upah adalah untuk meningkatkan taraf hidup pekerja, terdapat risiko terjadinya penyempitan kesempatan kerja akibat peningkatan beban biaya tenaga kerja, terutama di negara berkembang.

Kebijakan Upah Minimum Regional (UMR) menjadi isu strategis yang perlu dikaji lebih dalam, terutama karena perekonomian saat ini dihadapkan pada rendahnya tingkat upah dan tekanan inflasi yang berkelanjutan. Di sisi lain, suku bunga juga berperan penting sebagai instrumen makroekonomi dalam menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi. Jika UMR berdampak pada sisi

permintaan lewat peningkatan daya beli, maka suku bunga bekerja lewat mekanisme moneter, seperti pengaturan likuiditas, biaya pinjaman, dan dorongan untuk menabung.

Karena itu, memahami inflasi tidak cukup hanya dari aspek struktural seperti kebijakan upah, tetapi juga harus mempertimbangkan variabel moneter, terutama suku bunga. Ini menjadi semakin penting di daerah yang ekonominya tumbuh pesat seperti Kalimantan, di mana perubahan suku bunga sangat memengaruhi perilaku konsumsi, tabungan, dan investasi masyarakat—faktor yang bisa mendorong inflasi. Fluktuasi suku bunga patut dilihat sebagai salah satu faktor utama dalam dinamika inflasi. Tekanan inflasi bukan hanya berasal dari biaya produksi atau permintaan tenaga kerja, tetapi juga mencerminkan bagaimana kebijakan moneter merespons kondisi ekonomi. Karena itu, kajian tentang hubungan antara suku bunga dan inflasi penting untuk merumuskan strategi pengendalian inflasi yang lebih efektif dan adaptif.

Secara umum, otoritas moneter, dalam hal ini Bank Indonesia, menggunakan kebijakan suku bunga sebagai salah satu instrumen utama untuk mengarahkan stabilitas ekonomi (Susmiati dkk., 2021). Suku bunga, sebagaimana dijelaskan oleh Setriawati (2021) merupakan harga dari penggunaan dana pinjaman, dan berfungsi sebagai insentif atau disinsentif dalam aktivitas ekonomi (Amaliyah & Aryanto, 2022). Dalam praktiknya, tingkat suku bunga acuan yang ditetapkan melalui BI Rate menjadi referensi utama bagi perbankan dalam menentukan suku bunga berbagai produk keuangan seperti kredit, tabungan, dan deposito. Penyesuaian BI Rate umumnya dilakukan untuk mengatur laju pertumbuhan ekonomi dan mengendalikan tekanan inflasi yang berlebihan (Langi dkk., 2014).

**Tabel 1.5**
**Tingkat Suku Bunga Provinsi di Pulau Kalimantan**
**Tahun 2018-2023**

| Provinsi | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Kalimantan Barat** | 10,32 | 10,01 | 9,23 | 8,59 | 8,25 | 8,86 |
| **Kalimantan Tengah** | | | | | | |
| **Kalimantan Timur** | | | | | | |
| **Kalimantan Selatan** | | | | | | |
| **Kalimantan Utara** | | | | | | |

*Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025*

Data pada Tabel 1.5 menunjukkan bahwa rata-rata suku bunga di provinsi-provinsi Kalimantan selama 2018–2023 bersifat fluktuatif. Suku bunga menurun dari 10,32% pada 2018 ke level terendah 8,25% di 2022, mencerminkan kebijakan moneter ekspansif untuk merangsang pertumbuhan ekonomi di tengah pandemi. Tujuannya antara lain mendorong konsumsi, investasi, dan menjaga daya beli lewat pelonggaran kredit.

Namun, pada 2023 suku bunga naik menjadi 8,86%, menandai pergeseran ke arah kebijakan yang lebih ketat. Kenaikan ini didorong oleh tekanan inflasi global, gangguan pasokan, dan kebutuhan menjaga stabilitas nilai tukar serta arus modal. Langkah ini bertujuan meredam permintaan berlebih dan menekan inflasi, terutama di tengah pemulihan ekonomi dan pembangunan strategis seperti IKN.

Perubahan suku bunga ini berpengaruh besar terhadap inflasi dan aktivitas ekonomi di Kalimantan. Suku bunga rendah cenderung mendorong konsumsi dan investasi, sedangkan kenaikan suku bunga menekan keduanya sambil meningkatkan kecenderungan menabung, yang pada akhirnya membantu menstabilkan harga. Di tengah percepatan pembangunan, dinamika ini penting untuk menjaga kestabilan ekonomi dan daya beli masyarakat.

Dengan demikian, dinamika tingkat suku bunga selama periode 2018-2023 menggarisbawahi pentingnya kebijakan moneter sebagai instrumen dalam menjaga stabilitas makroekonomi, khususnya dalam pengendalian inflasi. Pemahaman yang lebih dalam terhadap hubungan antara suku bunga dan inflasi diperlukan untuk merumuskan kebijakan yang seimbang antara kebutuhan pertumbuhan ekonomi daerah dan pengendalian harga yang berkelanjutan. Hakim (2023), semakin tinggi tingkat suku bunga, maka kecenderungan masyarakat untuk menabung juga meningkat, sementara konsumsi terhadap barang dan jasa yang tidak bersifat mendesak cenderung ditunda. Selain itu, suku bunga yang tinggi juga menarik bagi investor yang lebih memilih keamanan dalam sektor perbankan daripada menempatkan dana pada sektor-sektor berisiko tinggi. Dengan demikian, pengaruh suku bunga terhadap inflasi menjadi semakin nyata melalui mekanisme preferensi konsumsi, tabungan, dan investasi.

Berdasarkan uraian tersebut, inflasi sebagai indikator penting dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah tidak dapat dipisahkan dari pengaruh berbagai faktor

ekonomi makro. Di wilayah Kalimantan yang tengah mengalami percepatan pembangunan, dinamika inflasi dipengaruhi oleh ekspor neto sebagai cerminan kinerja sektor eksternal, pengeluaran konsumsi pemerintah yang merefleksikan stimulus fiskal, upah minimum regional yang berkaitan dengan daya beli masyarakat, serta tingkat suku bunga sebagai instrumen moneter. Keempat variabel tersebut saling berinteraksi dalam memengaruhi tekanan harga di tingkat regional. Oleh karena itu, penting untuk melakukan kajian empiris yang komprehensif guna memahami sejauh mana kontribusi masing-masing variabel terhadap inflasi di provinsi-provinsi di Kalimantan, sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan yang mendukung stabilitas harga sekaligus pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di kawasan tersebut.

## 1.2 Rumusan Masalah

### 1.2.1 Pernyataan Masalah

Inflasi merupakan salah satu indikator utama dalam menilai kestabilan perekonomian suatu wilayah. Di tengah dinamika pembangunan ekonomi di provinsi-provinsi Kalimantan, laju inflasi tidak hanya dipengaruhi oleh faktor permintaan dan penawaran semata, tetapi juga oleh variabel-variabel makroekonomi seperti ekspor neto, pengeluaran konsumsi pemerintah, upah minimum regional, dan tingkat suku bunga. Namun, sejauh mana masing-masing variabel tersebut memberikan kontribusi terhadap fluktuasi inflasi di wilayah Kalimantan masih belum sepenuhnya dipahami secara empiris. Ketidaktahuan ini dapat menghambat perumusan kebijakan fiskal dan moneter yang tepat sasaran, terutama dalam konteks pengendalian inflasi yang tetap mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

### 1.2.2 Pertanyaan Penelitian

1. Apakah ada pengaruh Ekspor Neto terhadap inflasi di Pulau Kalimantan?
2. Apakah ada pengaruh pengeluaran konsumsi pemerintah terhadap inflasi di Pulau Kalimantan?
3. Apakah ada pengaruh upah minimum regional terhadap inflasi di Pulau Kalimantan?

4. Apakah ada pengaruh tingkat suku bunga terhadap inflasi di Pulau Kalimantan?

## 1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Ekspor Neto terhadap inflasi di Pulau Kalimantan.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pengeluaran konsumsi pemerintah terhadap inflasi di Pulau Kalimantan.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh upah minimum regional terhadap terhadap inflasi di Pulau Kalimantan.
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh tingkat suku bunga terhadap inflasi di Pulau Kalimantan.

## 1.4 Kontribusi Penelitian

### 1.4.1 Kontribusi Praktis

Bagi para pelaku ekonomi, seperti pelaku usaha dan investor, penelitian ini memberikan informasi strategis terkait faktor-faktor yang memengaruhi kestabilan harga. Pemahaman terhadap pengaruh suku bunga, kebijakan upah, serta peran perdagangan dan belanja pemerintah dapat membantu dalam perencanaan bisnis dan pengambilan keputusan investasi yang lebih responsif terhadap kondisi makroekonomi daerah.

### 1.4.2 Kontribusi Teoritis

Penelitian ini memperkaya literatur ekonomi makro regional dengan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh ekspor neto, pengeluaran konsumsi pemerintah, upah minimum regional, dan tingkat suku bunga terhadap inflasi di wilayah Kalimantan. Dengan fokus pada konteks regional yang spesifik, temuan dari penelitian ini dapat memperluas pemahaman mengenai dinamika inflasi di daerah yang tengah mengalami percepatan pembangunan dan transformasi struktural.